

[illegible]

**Rancangan Peraturan Pemerintah Tidak Layak UU P2SK**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kewenangan, pengurusan, dan pengawasan perdagangan aset kripto dan derivatif keuangan lainnya akan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Didid menyimpulkan, dengan demikian proses pengalihan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan pada industri P2K, khususnya aset kripto.

"Baptis" bersama OJK, dan Kementerian Keuangan harus berupaya maksimal menambatkan mata rantai 24 bulan sejak UU tersebut diadopsi. Artinya, yang akan diadopsi adalah semua komponen pada ekosistem aset kripto, termasuk bursa. Kami berkeinginan agar industri, ekosistem, dan masyarakat siap sehingga nantinya proses peralihan akan berjalan dengan baik" tandas Didid.